

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ke I, akan disampaikan hal-hal yang terkait dengan tujuan penulis ingin membuat pembahasan program bantuan luar negeri antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yaitu program EINRIP (Eastern Indonesia Road Improvement Project). Pembahasan pertama, akan disajikan pembahasan terkait latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan untuk menjelaskan apa saja yang akan dibahas di tulisan ini.

A. Latar Belakang Masalah

Keterbatasan infrastruktur jalan raya merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan di Indonesia. Ketiadaan infrastruktur jalan raya menyebabkan keterbatasan akses bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur Indonesia Barat dan Indonesia Timur, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang menghambat upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan raya. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah adanya tantangan dalam anggaran yang ditujukan dalam pembangunan infrastruktur jalan raya. Pasca terjadinya krisis moneter 1997, investasi negara dalam infrastruktur jalan raya tercatat 1-2% dari GDP Indonesia, turun dari posisi 5-6% dari GDP sebelum terjadinya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Menjelang beberapa tahun tepatnya di tahun 2004 Indonesia kembali mengalami kesulitan dalam pendanaan infrastruktur yang diakibatkan oleh tsunami di Aceh (Putra, Priadarsini, & Suwecawangsa, 2017, pp. 2-4).

Upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur jalan raya yang berkualitas di Indonesia, diwujudkan dengan upaya membentuk kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan fasilitas infrastruktur yang rusak maupun pembangunan fasilitas bangunan baru (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008, pp. 1-3). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menjalin kerjasama dengan Australia untuk membantu Indonesia dalam menciptakan pemerataan Infrastruktur jalan raya di Indonesia.

Melihat tantangan yang dihadapi, Pemerintah Indonesia sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Australia dengan dibuatnya kerjasama ekonomi yang dilakukan antara Mantan Perdana Menteri Australia, Hon. Alexander Downer, MP dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah kerjasama yaitu *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIRPD) pada 17 Maret 2005 bertempat di Canberra, Australia. Tujuan utama AIRPD adalah untuk mendukung upaya rekonstruksi dan pembangunan Indonesia, baik di dalam maupun di luar wilayah yang terkena dampak tsunami pada 26 Desember 2004, melalui kerja sama berkelanjutan yang difokuskan pada program reformasi Pemerintah Indonesia, dengan penekanan pada pembangunan ekonomi (Downer, 2005).

Pada 7 Desember 2005 telah diinisiasi program *Eastern Indonesia National Roads Improvement Project* (EINRIP). EINRIP merupakan bagian dari *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIRPD). EINRIP merupakan program peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Indonesia Timur dalam bentuk pembukaan akses jalan raya oleh Pemerintah Australia dan Indonesia. Bentuk Kerjasama ini berupa *loan* atau pinjaman dana sebesar AUD 328, 00 juta dengan AUD 300, 00 juta sebagai dana pinjaman (*loan*) dan AUD 28, 00 juta sebagai dana hibah berupa bantuan teknik oleh pemerintah Australia melalui Australian Aid atau AusAID (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, pp. 40-41). Program EINRIP

diberlakukan selama sepuluh tahun yakni dari tahun 2005-2015, yang dimana pengimplementasiannya dimulai dari tahun 2008 (Australian Government, 2013). EINRIP dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia Timur, salah satunya di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Salah satu lokasi pelaksanaan EINRIP bertempat di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Alasan dipilihnya Pulau Sumbawa sebagai salah satu lokasi dilaksanakannya program EINRIP yaitu untuk meningkatkan jaringan jalan mencapai kualitas tinggi guna meningkatkan tingkat pelayanan dan perluasan konektivitas untuk pengembangan ekonomi lokal maupun regional. Kondisi infrastruktur jalan raya di Sumbawa yang dibangun sebelum adanya program EINRIP bisa dibilang dalam kondisi kurang baik. Berdasarkan data dari PU-net pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa dari total panjang jalan nasional di wilayahnya (601 km), 14% diantaranya mengalami kerusakan. Kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat yang membuat aktivitas perekonomian terganggu. Selain itu ke kurang efektifnya jalan di Sumbawa mengakibatkan tingginya tarif pendistribusian barang baik dari lokal maupun regional (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2009). Australia melalui program EINRIP memberikan paket berupa bantuan 4 paket EINRIP yang diberikan ke Pulau Sumbawa untuk memperbaiki kondisi jalan raya. Paket yang diberikan yaitu ENB-01AB: Sumbawa Besar-Bypass, ENB-01C: Sumbawa Pal IV- Km 70, ENB-02: Km 70- Cadbin Dompu, ENB-03: Cadbin Dompu-Banggo. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Pelaksanaan program EINRIP di pulau Sumbawa berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 2009 dan telah diselesaikan pada tahun 2013. Sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam menjalankan kerjasama dengan Australia melalui program EINRIP, maka perlu adanya evaluasi setelah diterapkannya program EINRIP dan hal ini yang membuat penulis ingin meneliti dampak penerapan program EINRIP dalam menyelesaikan masalah infrastruktur di pulau Sumbawa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, makapenulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana program *Eastern Indonesia National Road Improvement Project* (EINRIP) dapat dikatakan efektif dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan di Pulau Sumbawa tahun 2009-2013?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis memilih judul “Australian AID dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Indonesia: Studi atas Program EINRIP (*Eastern National Road Improvement Project*) Dalam Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Kesejahteraan di Pulau Sumbawa Tahun 2009-2013” adalah Untuk mengetahui apakah bantuan program EINRIP yang diberikan oleh pemerintah Australia dapat dikatakan efektif dan memberikan dampak positif dalam penerapan program tersebut di Pulau Sumbawa.

D. Kerangka Berfikir

a. Konsep Bantuan Luar Negeri (Bantuan Luar Negeri)

Salah satu pengimplementasian kerjasama internasional yaitu pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri atau *foreign aid* didefinisikan sebagai segala jenis bantuan yang diberikan oleh negara atau lembaga donor internasional, baik berupa

pinjaman atau hibah dengan persyaratan tertentu (White, 1974, p. 188).

Secara umum, Micheal Todaro mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai:

“Segala sesuatu yang berurusan dengan pemindahan sumber-sumber kebendaan material dan jasa-jasa dari negara-negara tertentu terhadap negara lainnya yang memerlukan dalam suatu ikatan transaksi berbentuk pinjaman, pemberian atau penanaman modal” (Ikbar, Ekonomi Politik Internasional 2: Implementasi Konsep dan Teori, 2007, p. 188).

Menurut Yanuar Ikbar (2007, pp. 191-192) bahwa peranan bantuan luar negeri memiliki beberapa motif. Salah satu motif peranan bantuan luar negeri yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi menurut Yanuar Ikbar merupakan pembenaran yang rasional dalam menggambarkan pemberian bantuan luar negeri, argumentasi esensial dalam pemberian bantuan luar negeri dapat dipahami dari beberapa konsep, yaitu:

1. Bantuan luar negeri utamanya diberikan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan di negara-negara yang diberi bantuan; konsep ini menjelaskan bahwasannya bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara pendonor bertujuan untuk mengubah keadaan negara penerima bantuan di berbagai bidang, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain.
2. Bantuan luar negeri tidak hanya berbentuk modal, tetapi juga tenaga ahli, manajemen, dan ahli teknologi. Konsep ini menjelaskan bahwa pemberian bantuan luar negeri tidak hanya diberikan kepada negara penerima dalam bentuk modal atau dana, melainkan bantuan

luar negeri diharapkan menyertakan bantuan berupa tenaga kerja ahli, manajemen, dan ahli teknologi yang dapat membantu negara penerima bantuan dalam mengoptimalkan hasil penerapan bantuan luar negeri.

Dilihat dari jenis bantuan luar negeri, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia melalui program EINRIP dapat tergolong dalam jenis bantuan proyek atau *Project Aid* dimana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Australia berupa pinjaman dana sebesar AUD 300, 00 juta. Pinjaman bantuan tersebut disalurkan melalui program paket dalam rangka rehabilitasi infrastruktur jalan raya khususnya di Sumbawa. Dampak yang diharapkan dari *Project Aid* yaitu bantuan luar negeri yang diterima dapat membantu negara penerima dalam memajukan infrastruktur dalam negerinya. (Lancaster, 2008, pp. 13-15).

Bantuan Proyek atau *Project Aid* yang berkaitan dengan pembentukan kerjasama dalam pemberian bantuan proyek antara negara pendonor dan negara penerima bantuan. *Project Aid* juga berkaitan dengan tujuan pemberian bantuan luar negeri yaitu sebagai bantuan pembangunan yang ditujukan untuk mendukung kemajuan ekonomi, sosial dan dalam berbagai bidang lainnya. Bentuk bantuan kerjasama dari *Project Aid* dapat berupa *loan* (pinjaman) yang bertujuan untuk membantu negara penerima dana dalam mewujudkan rehabilitasi dan pengadaan infrastruktur bagi negara penerima bantuan luar negeri. Bantuan Proyek terdiri dari lima tahap yang terdiri dari: identifikasi, perumusan, penilaian, pelaksanaan serta evaluasi dari bantuan proyek yang diterima oleh negara penerima bantuan (Ronk, 1993, pp. 387-388).

Konsep bantuan luar negeri diatas secara garis besar yaitu pemberian modal kepada negara penerima bantuan oleh sebuah lembaga atau negara pendonor

bantuan luar negeri yang bertujuan untuk mengubah keadaan negara penerima bantuan dalam berbagai bidang. Konsep bantuan luar negeri memiliki konsep turunan yang dapat memberikan penjelasan bagaimana sebuah bantuan luar negeri dapat dikatakan berhasil atau berdampak positif terhadap negara penerima bantuan. Konsep turunan dari konsep bantuan luar negeri diatas adalah konsep efektifitas bantuan luar negeri (*Aid Effectiviness*).

b. Konsep Efektivitas Bantuan (*Aid Effectiviness*)

Pengertian *Aid efectiviness* secara sederhana dapat dimaknai sebagai efektivitas bantuan pembangunan dalam mencapai kestabilan pembangunan manusia ataupun ekonomi yang diartikan sebagai target pembangunan. Konsep efektivitas bantuan ini terebentuk atas dasar banyaknya laporan mengenai kurang optimalnya pemanfaatan bantuan luar negeri di beberapa negara, terutama di wilayah Afrika dan Asia Selatan (Mahottama, 2011, pp. 29-30).

Pada tahun 2005, Salah satu organisasi yang bernama *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang berkomitmen dalam menangani masalah bantuan luar negeri menginisiasi pertemuan yang dikenal dengan pertemuan *Paris Declaration on Aid Effectiveness* (Mahottama, 2011, p. 30). Pertemuan tersebut merupakan titik tolak untuk memberikan kesadaran akan pertanggungjawaban atas pemanfaatan bantuan luar negeri di berbagai negara. Indonesia juga menjadi pihak yang ikut menandatangani perjanjian *Paris Declaration on Aid Effectiveness* dan berkomitmen untuk mematuhi isi perjanjian tersebut. Bentuk komitmen Indonesia atas perjanjian tersebut ditandai dengan dibentuknya *Jakarta Commitment*, dimana pemerintah Indonesia menekankan pentingnya

bantuan dari luar negeri (negeri pendonor) dalam upaya pembangunan (Hanik, 2010, pp. 47-48).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (2005, pp. 3-8), pertemuan di Paris menghasilkan lima prinsip dasar *aid effectiveness*, yaitu:

1. Kepemilikan Kebijakan (*Policy Ownership*)

Kepemilikan kebijakan mengharuskan negara penerima bantuan untuk memiliki kebijakan dan strategi pembangunannya sendiri, serta mengelola usaha pembangunan di lapangan.

2. Keselarasan Lokal (*Local Alignment*)

Keselarasan Lokal yang mengharuskan bagi para pendonor untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembangunan negara berkembang, dan apabila memungkinkan harus selalu memprioritaskan lembaga atau institusi lokal dalam pengelolaan bantuan.

3. Harmonisasi (*Harmonization*)

Harmonisasi mengharuskan para pendonor untuk melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan kepada negara penerima bantuan, agar bantuan tidak tumpang tindih dan menyusahkan pemerintah negara penerima bantuan.

4. Pengelolaan Berbasis Hasil Pembangunan (*Managing for Results*)

Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam bantuan untuk mengutamakan dan memperhatikan hasil dari bantuan yang telah disepakati. Tidak hanya sekedar pelaksanaan teknis, melainkan pengembangan alat, metode dan mekanisme untuk mengetahui apakah bantuan tersebut memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat penerima bantuan Luar Negeri.

5. Pertanggungjawaban Bersama (*Mutual Accountability*)

Adanya pertanggung jawaban penggunaan dana dan pelaksanaan bantuan secara transparan, kepada masyarakat, serta parlemen, mengenai dampak dan hasil bantuan yang telah diterapkan (termasuk hasil-hasil pembangunan).

Jika bantuan asing dapat memenuhi kelima prinsip di atas, maka bantuan asing dianggap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat atau negara yang menerima bantuan tersebut. Sebaliknya, jika kelima prinsip tersebut tidak dapat terpenuhi, maka bantuan asing tidak dapat maksimal memberikan dampak positif terhadap masyarakat atau negara penerima bantuan asing. Dampak positif tersebut dapat dirasakan dalam beberapa aspek seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Dampak positif bantuan asing dalam aspek infrastruktur dapat dirasakan dengan pengadaan infrastruktur berbentuk fisik (jembatan, jalan raya, dan lain-lain) yang dapat mendorong lajur pembangunan ekonomi, seperti peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kemampuan ekspor produk andalan, penurunan angka kecelakaan di jalan raya di daerah yang diberi bantuan, dan lain-lain (Murshed & Khanaum, 2018, pp. 34-37).

Dampak pemberian bantuan asing dalam aspek kesehatan, dapat dirasakan dengan adanya pertukaran ilmu dan teknologi dalam menghadapi permasalahan kesehatan dengan lingkup internasional. Lingkup internasional dapat berupa penanganan penyakit-penyakit berbahaya, seperti penyakit HIV/AIDS, malaria, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Bantuan asing dalam aspek kesehatan ini mulai berkembang ke beberapa sektor, seperti bantuan asing yang diberikan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga kesehatan dalam melakukan kegiatan medis (Burfeind, 2014, pp. 5-8). Dampak bantuan asing dalam aspek pendidikan dapat dirasakan dengan peningkatan kualitas sistem kurikulum, peningkatan akses dalam mencari

sumber pengetahuan. (Riddell & Nino-Zarazua, 2015, pp. 24-26).

Berdasarkan konsep *Aid efectiviness*, bantuan program yang diberikan pemerintah Australia kepada Indonesia melalui EINRIP yang diterapkan di Pulau Sumbawa telah memenuhi kelima prinsip tersebut. Penulis akan mencoba untuk mengukur efektifitas program EINRIP yang diterapkan di Indonesia, khususnya Pulau Sumbawa dengan menggunakan konsep *Aid Efectiviness*.

c. Konsep Dampak Bantuan Luar Negeri

Motif pemberian bantuan luar negeri menurut *Yanuar Akbar* yaitu menjelaskan bahwasannya bantuan luar negeri memiliki motif untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan di negara-negara yang diberi bantuan atau dengan kata lain bertujuan untuk mengubah keadaan negara penerima bantuan di berbagai bidang (2007, pp. 191-192). Setelah mengetahui tujuan dari diberikannya bantuan luar negeri, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana dampak sebuah bantuan luar negeri yang diberikan oleh pihak pendonor bantuan kepada penerima bantuan.

Dampak sebuah bantuan luar negeri tertulis di sebuah jurnal karya *Tian-Hee Yiew dan Evan Lau* yang berjudul "*Does Foreign Aid Contribute to or impeded economic growth?*". Dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa bantuan luar negeri dapat memberikan kontribusi pada perkembangan sosial infrastruktur, infrastruktur, pelayanan ekonomi dan sektor produksi. Dengan demikian, dampak bantuan asing dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan. Dampak bantuan luar negeri juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan cara memberlakukan bantuan

yang efisien seperti salah satunya memulai atau menerapkan bantuan proyek infrastruktur (Yiew & Lau, 2018).

Berdasarkan penjelasan mengenai dampak bantuan luar negeri diatas, bantuan luar negeri dapat meningkatkan negara penerima bantuan dalam hal perkembangan sosial infrastruktur, infrastruktur, pelayanan ekonomi dan sektor produksi dengan cara menerapkan proyek infrastruktur. Sesuai dengan tujuan EINRIP yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah bagian timur Indonesia yang salah satu targetnya yaitu pulau Sumbawa, masyarakat di pulau Sumbawa diharapkan dapat memperoleh dampak dari penerapan program EINRIP tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan mengkaji dampak penerapan program EINRIP menggunakan laporan hasil lembaga penelitian yang membahas perihal dampak yang diberikan oleh program EINRIP terhadap peningkatan infrastruktur jalan raya serta manfaat yang di dapat oleh masyarakat di pulau Sumbawa.

E. Hipotesa

Berdasarkan konsep dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis menarik hipotesa bahwa :

- Bantuan Program EINRIP yang diterapkan di Pulau Sumbawa dapat dikatakan efektif, karena program EINRIP telah memenuhi prinsip-prinsip efektifnya sebuah kejasama bantuan luar negeri berdasarkan prinsip *aid effectiveness*.
- Hasil dari Jalan raya yang diterapkan oleh program EINRIP di Pulau Sumbawa memberikan dampak positif terhadap kegiatan masyarakat di pulau Sumbawa seperti pada aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu dimana metode ini menekankan proses penelitian pada pencarian makna, karakteristik, gejala maupun deskripsi tentang suatu fenomena.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi menggunakan data sekunder. Pengolahan data sekunder meliputi studi pustaka (*library research*) dari berbagai sumber tulisan baik cetak maupun digital. Sumber tulisan tersebut meliputi karya-karya pemikiran para ahli yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I

Bab I terdiri dari pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang yang membahas tentang sejarah kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Kemudian rumusan masalah sebagai fokus pembatas kajian penelitian ini. Untuk menganalisis masalah secara ilmiah, maka peneliti menggunakan kerangka berfikir yang ada di Bab I ini. Selanjutnya adalah hipotesis terhadap penelitian ini, metode penelitian sebagai langkah operasional penelitian, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II

Pada Bab II akan diuraikan penjelasan tentang apa itu Australian AID (AusAID) sebagai pendonor bantuan luar negeri ke Indonesia dan penjelasan EINRIP baik dari , perencanaan program meliputi persiapan, rancangan dana proyek, koordinasi program EINRIP, serta pemaparan tentang

paket-paket yang disediakan oleh program ini untuk wilayah Indonesia bagian Timur.

Bab III

Pada Bab III akan diuraikan kondisi infrastruktur di Indonesia, profil Sumbawa, serta penerapan paket-paket EINRIP di Pulau Sumbawa, dan penjelasan tentang problematika infrastruktur di pulau Sumbawa sebelum diterapkan program EINRIP.

Bab

IV

Memaparkan dan menjelaskan dampak-dampak dari penerapan program EINRIP di masing-masing program paket EINRIP yang telah di terapkan. di Pulau Sumbawa sebagai target penerapan program tersebut.

Bab V

Pada Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini.

